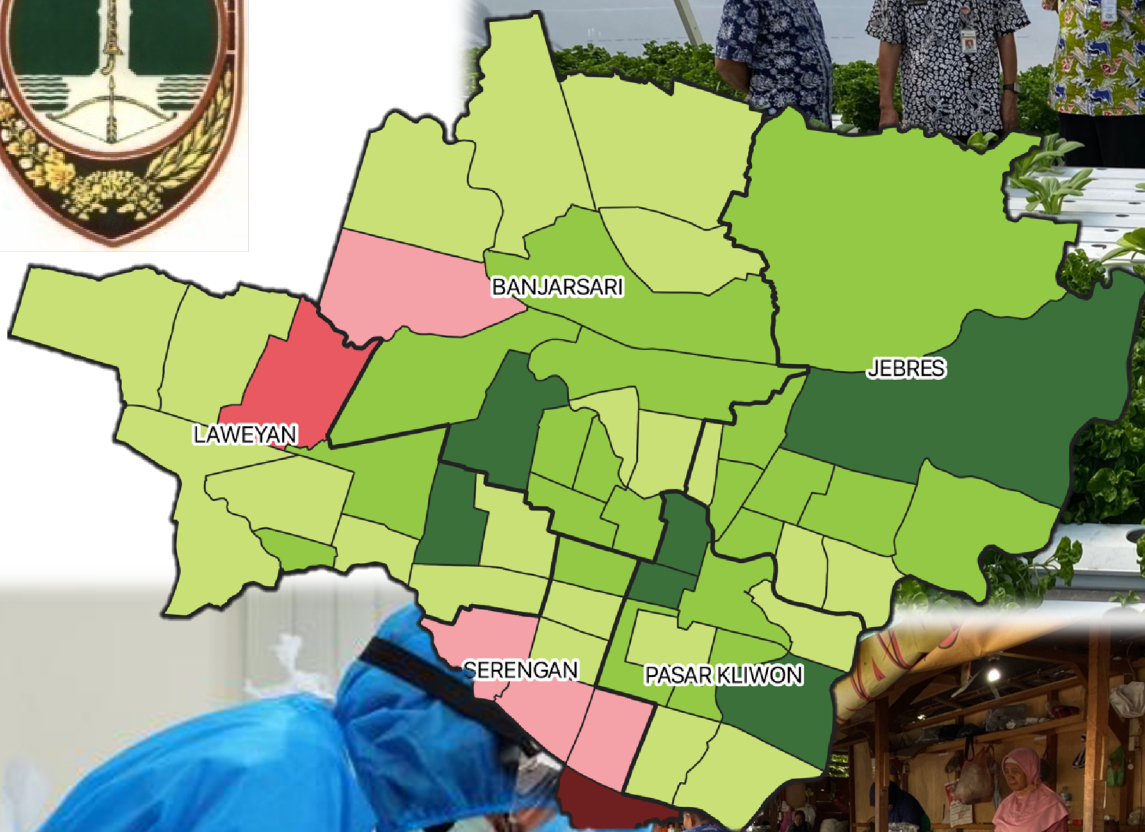
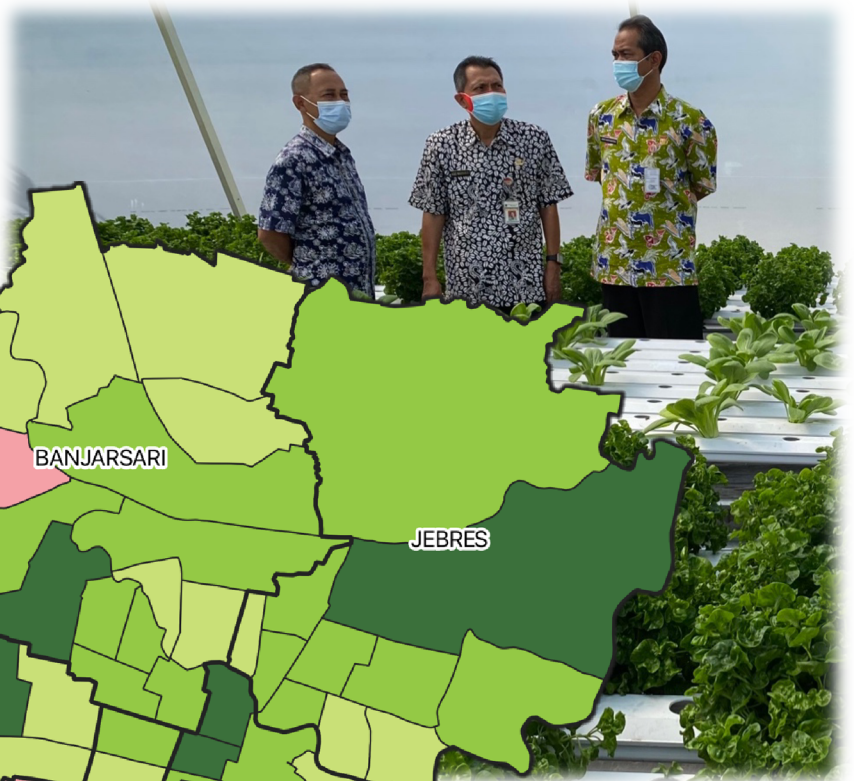


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)

KOTA SURAKARTA TAHUN 2021



DINAS PERTANIAN

KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Yap Tjwan Bing(Jagalan) No.26 Telp./Fax : (0271) 656816 / 630778

Website : www.disperten.surakarta.go.id E -mail: pertanian@surakarta.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
- 1.3. Metodologi

2 KETERSEDIAAN PANGAN

- 2.1. Sarana dan Prasarana Ekonomi
- 2.2. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

3 AKSES PANGAN

- 3.1. Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga
- 3.2. Akses Penghubung
- 3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan

4 PEMANFAATAN PANGAN

- 4.1. Akses Air Bersih
- 4.2. Akses Tenaga Kesehatan
- 4.3. Strategi Pemenuhan Pangan

5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

- 5.1. Kondisi Ketahanan Pangan
- 5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

KATA PENGANTAR

Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) Kota Surakarta 2021, Penyajian peta untuk perencanaan kebijakan pangan merupakan publikasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta yang disusun dalam rangka pemetaan ketahanan dan kerawanan pangan untuk mendukung perencanaan kebijakan pangan dan gizi di Kota Surakarta.

Publikasi ini merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kalurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, Kami sampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga publikasi ini mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan baik oleh instansi pemerintah, swasta dan kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Surakarta, November 2021

Kepala Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kota Surakarta



Drs. Aryo Widyandoko, MH

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ketahanan pangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kota merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kalurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kalurahan. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kota.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; dan (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; dan (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; dan (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan

6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2021 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 6 kelurahan dari 54 kelurahan (11%) yang terdiri dari 1 kelurahan (2%) Prioritas 1; 1 kelurahan (2%) Prioritas 2; dan 4 kelurahan (7%). Desa prioritas 1 di kecamatan Serengan yaitu Kelurahan Joyontakan. Desa prioritas 2 di kecamatan Laweyan yaitu di Kelurahan Kerten; Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Banjarsari di Kelurahan Sumber dan di Kecamatan Serengan yaitu di Kelurahan Danukusuman, Serengan dan Tipes.
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan rendahnya proporsi jumlah tenaga Kesehatan, besarnya jumlah penduduk tidak sejahtera dan kurangnya sarana dan prasarana pangan terhadap jumlah rumah tangga.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan kalurahan diarahkan pada kegiatan:
 - a. Peningkatan diversifikasi sumber pangan
 - b. Pemanfaatan Pekarangan untuk *urban farming*
 - c. Penanganan kemiskinan melalui padat karya, pembangunan infrastruktur dasar dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/ewarong untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
 - d. Peningkatan akses IPAL masyarakat melalui penyediaan fasilitas dan layanan IPAL; sosialisasi dan penyuluhan.
 - e. Penyediaan tenaga kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan dan 54 kalurahan dengan total penduduk sebanyak 578.350 jiwa (Dispendukcapil, 2020). Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis terletak di bagian Selatan garis Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 110° 45' 15"- 110° 45' 35" Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 7° 36'- 7° 56' Lintang Selatan. Kota Surakarta di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar yang memiliki wilayah daratan seluas 46,724 km² atau 4.672,4 ha. Secara klimatologis, Kota Surakarta memiliki pola tipe curah hujan tipe kering, yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta pada Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi, yaitu mencapai 27,04 persen (angka ini turun dari 27,11 persen di Tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 21,63 persen (turun dari 22,16 persen di Tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 14,54 persen (naik dari 12,01 persen di Tahun 2019). Kontribusi kategori Industri pengolahan sebesar 8,45 persen (turun dari 8,46 persen di Tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Administrasi pemerintahan sebesar 5,39 persen (turun dari 5,40 persen di Tahun 2019).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, kelompok kategori informasi dan komunikasi serta Jasa Pendidikan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman peranannya berangsur-angsur menurun.

Sedangkan dua lapangan usaha yang lain (Administrasi Pemerintahan, Penyedia makan dan minum) peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Salah satu penyebab meningkatnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah meningkatnya lapangan usaha peternakan pada lapangan usaha tersebut. Kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab naiknya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten/Kota dengan analisis sampai tingkat desa/kalurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten/kota telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa/kalurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten/Kota pada tahun 2021.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten/Kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa/kalurahan.

Pengembangan FSVA tingkat desa/kalurahan merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat

menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten/Kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

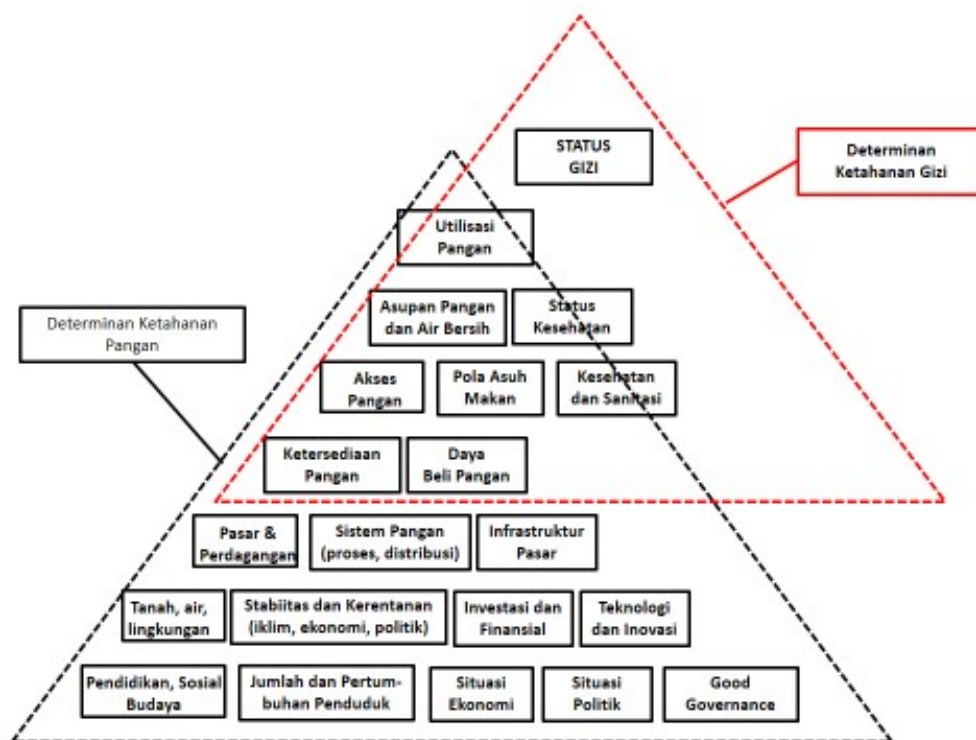
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah *United Nations* (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar I.1.



Gambar I.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar I.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut. **Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan

persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan

aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten/Kota didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa/kelurahan.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel I.1. Indikator FSVA Kabupaten/Kota 2021

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2020
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2020, BPS Jumlah Rumah Tangga 2020 dari Sensus Penduduk (SP) 2020

B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah Penduduk Desa dari SP 2020
Indikator	Definisi	Sumber Data
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2020, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Potensi Desa 2020, BPS Jumlah penduduk dari SP 2020

Metode Analisis 1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika

variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0–100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y_j = \sum_{i=1}^n a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel I.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/3
Sub Total		1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3

c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi z-score dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J a_i

: Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-l kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB II KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

Kota Surakarta merupakan wilayah perkotaan yang semua bahan pangan bersumber dari luar wilayah. Oleh karena itu ketersediaan pangan di Kota Surakarta terterkait erat dengan keberadaan sarana prasarana penyedia pangan yang terdiri atas kelompok pertokoan, pasar (permanen, semi permanen dan tanpa bangunan), minimarket/swalayan, toko/warung kelontong, restoran, warung/kedai makanan, hotel, serta losmen.

II.1. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

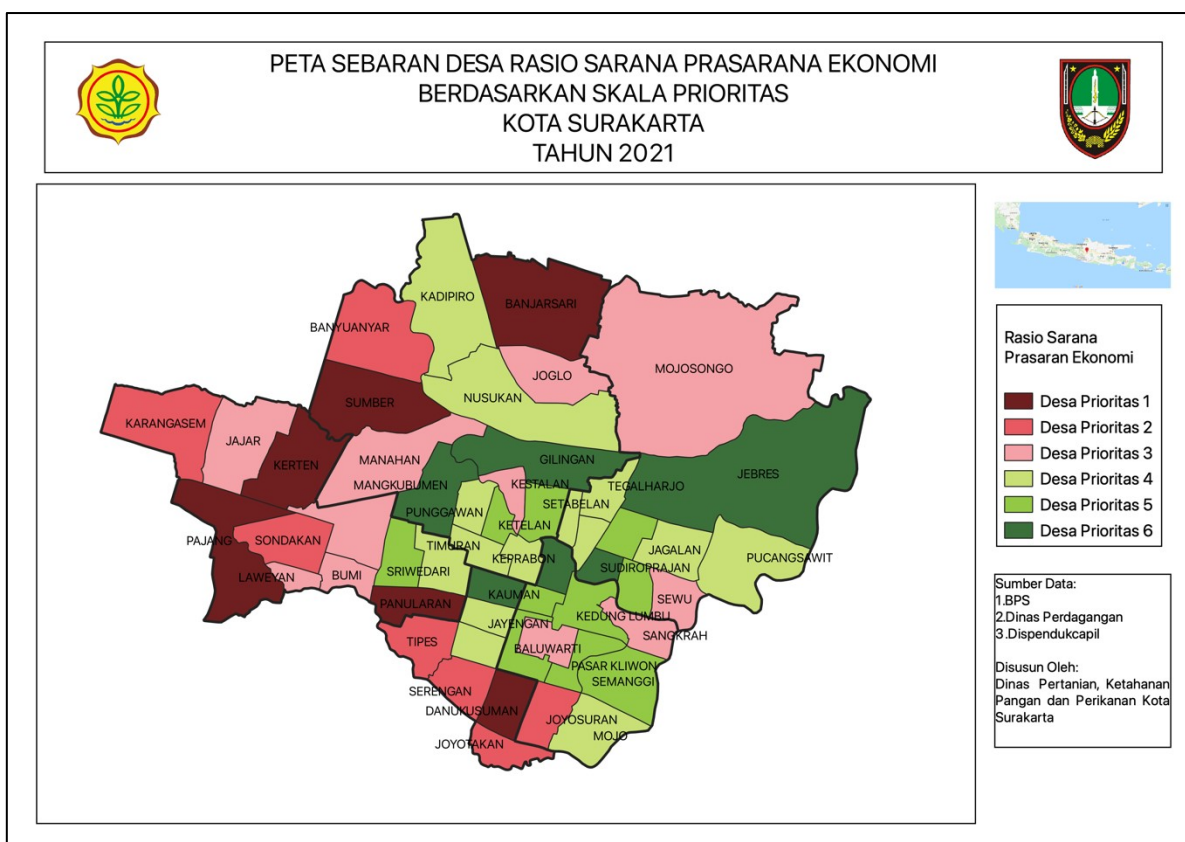
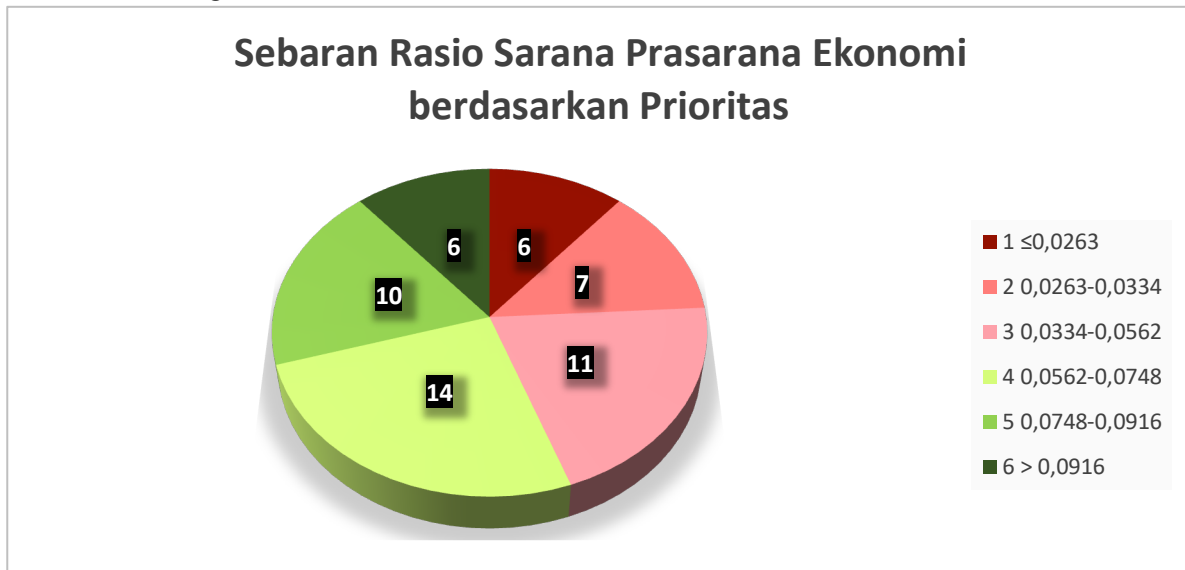
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa/kalurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa/kalurahan tersebut.

Dari 54 Kalurahan di Kota Surakarta, 6 Kalurahan masuk dalam prioritas 1 (11 %), 7 Kalurahan prioritas 2 (13 %) dan 11 Kalurahan prioritas 3 (20 %).

Tabel II.1 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Kalurahan	Persentase
1	Desa Prioritas 1	$\leq 0,0263$	6	11%
2	Desa Prioritas 2	0,0263-0,0334	7	13%
3	Desa Prioritas 3	0,0334-0,0562	11	20%
4	Desa Prioritas 4	0,0562-0,0748	14	26%
5	Desa Prioritas 5	0,0748-0,0916	10	19%
6	Desa Prioritas 6	$> 0,0916$	6	11%

Gambar II.1 Bagan Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas



Gambar II.2 Peta Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas

II.2. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2016-2020 mencapai 0,92% per tahun. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 44%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Sumber penyediaan bahan pangan di Kota Surakarta berasal dari luar wilayah Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi Kota Surakarta lebih bertumpu pada perdagangan dan jasa bukan pertanian sehingga bahan pangan yang berasal dari produksi lebih sedikit.

Ketersediaan pangan pokok Kota Surakarta dari tahun ke tahun dapat dikatakan aman, hal ini karena pasokan pangan dari daerah sekitarnya terutama Solo Raya sehingga kebutuhan pokok di Kota Surakarta tercukupi bahkan surplus.

Terkait dengan hal tersebut, strategi untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan di Kota Surakarta adalah dengan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam kelompok bahan pangan sayuran dan juga berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pangan se Solo Raya untuk menjaga agar tidak terjadi kekurangan stok pangan di Kota Surakarta.

BAB III AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kota, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kalurahan; dan (2) Kalurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

III. 1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kota Surakarta Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kota Surakarta terus mengalami penurunan dari 8,02% (15.058 KK/RTS) Tahun 2019 menjadi 6,96% (13.431 KK/RTS) Tahun 2020.

Tabel III.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Surakarta

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk miskin	31,69%	21,40%	20,13%	8,02%	6,96%

Sumber: Data E-SIK Kota Surakarta

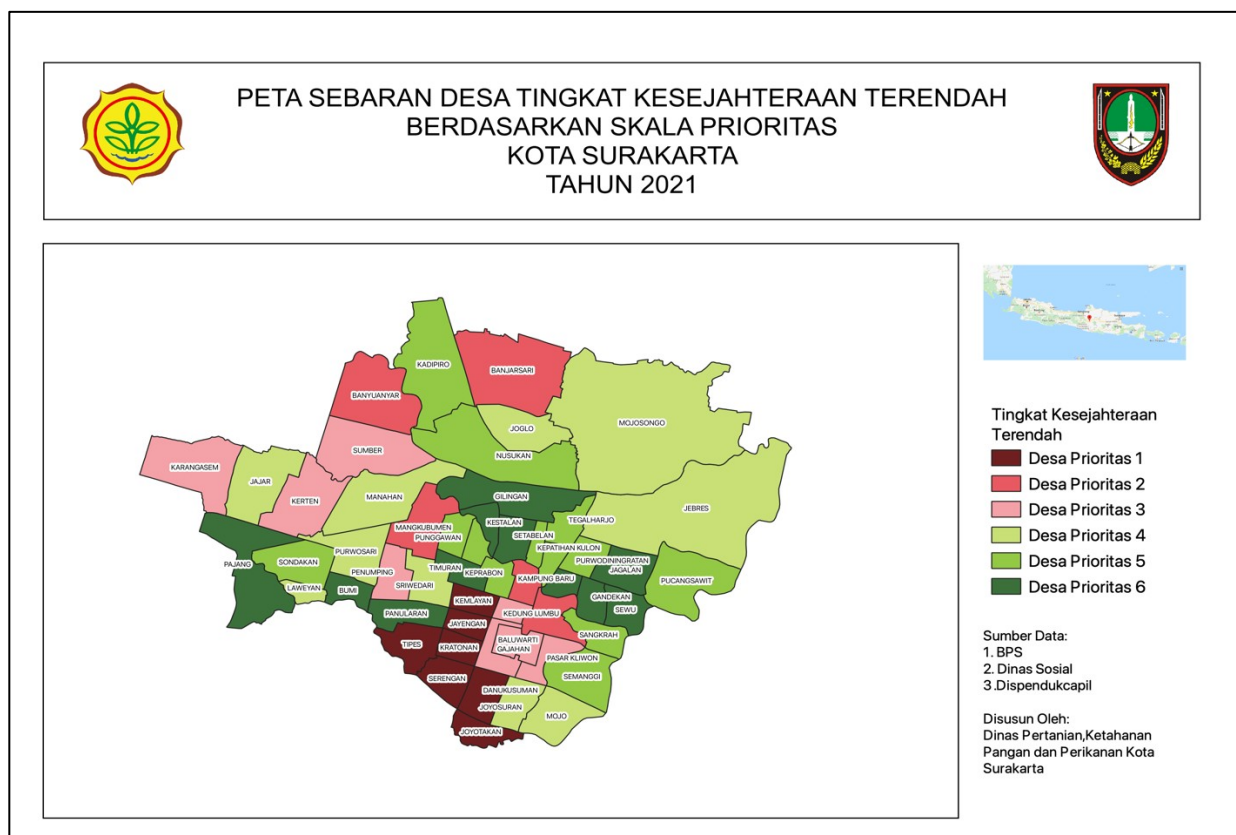
Pada tingkat kelurahan berdasarkan data Data E-SIK Tahun 2020, terhadap beberapa kelurahan yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kota ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di kelurahan yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah tersebut. Berdasarkan Peta sebaran Kalurahan tingkat kesejahteraan terendah yang masuk prioritas 1 antara lain kalurahan Joyontakan, Danukusuman, Tipes, Kratonan, Jayengan dan Kemlayan yang keenam kelurahan tersebut merupakan wilayah Kecamatan Serengan. Kalurahan yang masuk prioritas 2 antara lain Banyuanyar, Banjarsari, Mangkubumen, Kampung Baru dan Kedung Lumbu. Sedangkan kelurahan Karangasem, Kerten, Sriwedari, Penumping, Baluwarti dan Gajahan masuk pada prioritas 3.

Tabel III. 2 Sebaran Kalurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	≤0,0948	10	19%
2	0,0864-0,0948	6	11%
3	0,0697-0,0864	9	17%
4	0,0558-0,0697	15	28%
5	0,0400-0,0558	7	13%
6	<0,0400	7	13%



Gambar III.1 Bagan Sebaran Kalurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas



Gambar III. 2 Peta Sebaran Kalurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas

III.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainlain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2020, BPS, di Kota Surakarta semua kalurahan memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

III.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya:

Strategi Pengurangan Kemiskinan

- Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses terhadap Pangan diselesaikan dengan cara melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan data kemiskinan daerah maupun nasional dan

optimalisasi program-program bantuan sosial yang ada seperti Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai wajib memenuhi 4 unsur pangan yaitu Sumber Karbohidrat, Sumber Protein Nabati, Sumber Protein Hewani, serta Sumber Vitamin dan Mineral.

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kegiatannya terdapat pendampingan dan pelatihan bagi keluarga baik pelatihan tentang peningkatan ekonomi keluarga maupun pemahaman pentingnya gizi bagi keluarga menuju keluarga sejahtera sehat jasmani. Selain program tersebut, Strategi yang dilakukan pada tahun 2021 adalah kegiatan penyaluran cadangan pangan berupa beras, diberikan pada warga yang rentan sosial karena terdampak covid-19 dan kegiatan pembangunan lainnya serta kegiatan penyerahan bahan pangan untuk stimulant gizi posyandu agar tidak terjadi kerawanan pangan berkelanjutan pada warga miskin ataupun warga rentan sosial.

Strategi Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk mengurangi Kemiskinan

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan permasalahan kesejahteraan sosial keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- Meningkatkan pemenuhan hak dasar melalui perlindungan dan pemberdayaan ekonomi dengan program-program :
 1. Penyaluran bantuan bagi warga rentan dan terdampak bencana.
 2. Fasilitasi agar mampu berusaha / bekerja bagi kelompok rentan.
 3. Memperbaharui data e-SIK sehingga dapat diketahui data riil jumlah masyarakat miskin yang sebenarnya di Surakarta

BAB IV PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kota, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

IV.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak³. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel IV.1 Sebaran kalurahan berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kalurahan	Persentase
1	≤0,0000	0	0%
2	0,0000-0,0000	0	0%
3	0,0000-0,0000	0	0%
4	0,0000-0,0000	0	0%
5	0,0000-0,0000	0	0%
6	0,0000-0,0000	54	100%

³ Permenkes 416 Tahun 1990

IV.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk kalurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk kalurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

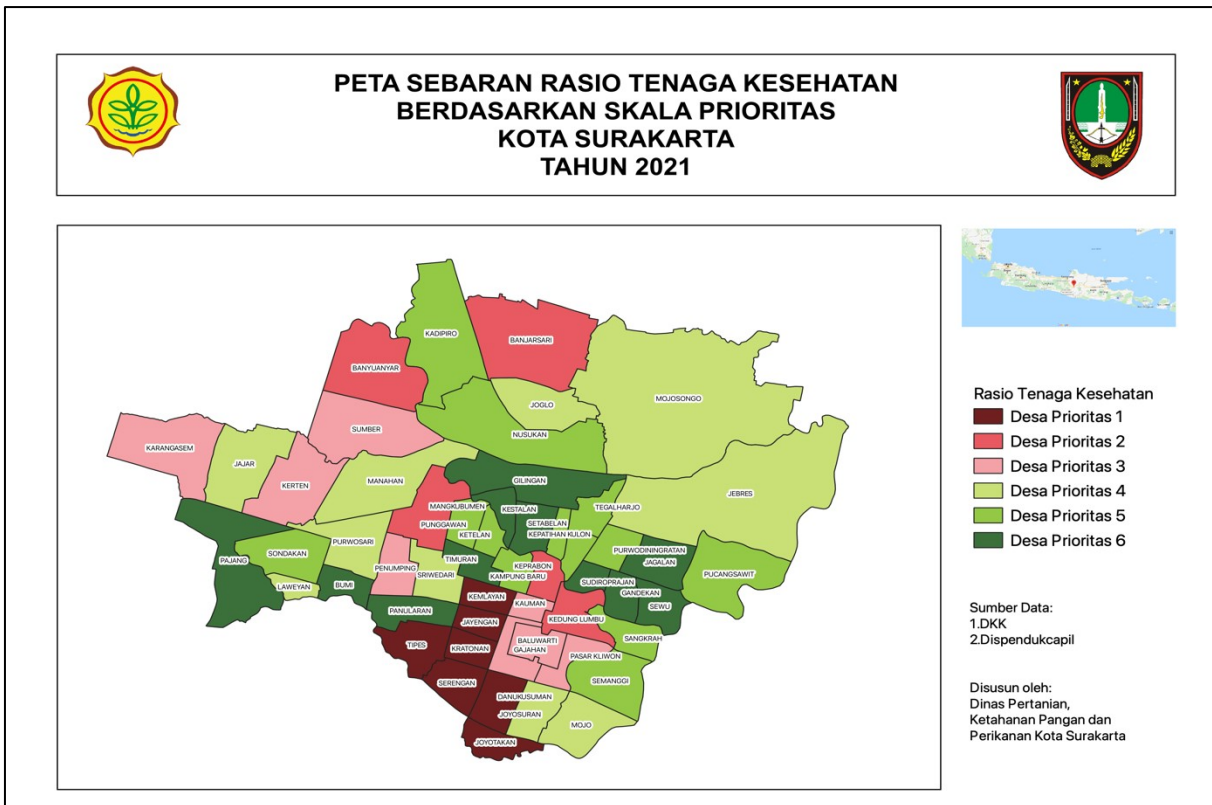
Rasio jumlah penduduk kalurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kalurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel IV.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di Kalurahan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kalurahan	Persentase
1	$\leq 0,0156$	7	13%
2	0,0107-0,0156	5	9%
3	0,0085-0,0107	8	15%
4	0,0054-0,0085	10	19%
5	0,0043-0,0054	13	24%
6	$< 0,0043$	11	20%



Gambar IV.1 Bagan Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan berdasarkan Skala Prioritas



Gambar IV.2 Peta Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Berdasarkan Skala Prioritas

IV.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan *Zscore* dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan *Zscore* kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan *Zscore* kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Tidak ada balita penderita gizi buruk di Kota Surakarta pada tahun 2016-2020. Pada Tahun 2020 di Kota Surakarta jumlah anak pendek atau *stunting* sebesar 3,37% dari jumlah keseluruhan Balita atau sebanyak 1.059 dari 31.453 Balita di Kota Surakarta. Di Kecamatan Pasar Kliwon terbanyak atau sebanyak 491 anak, Kecamatan Jebres 361 anak, Kecamatan Banjarsari sebanyak 142 anak, Kecamatan Serengan sebanyak 33 anak dan Kecamatan Laweyan sebanyak 32 anak.

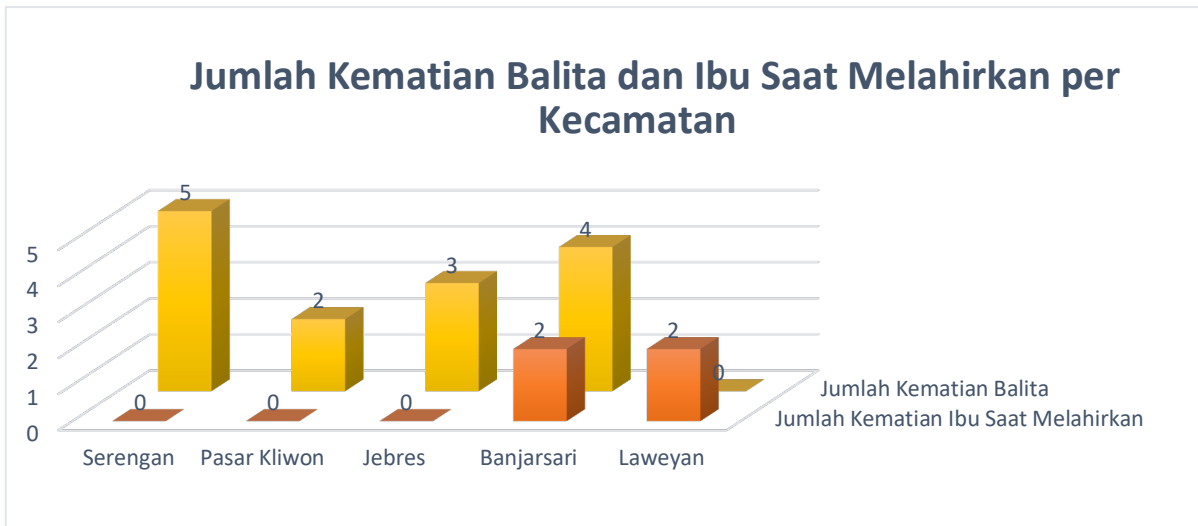


Gambar IV.3 Grafik Penderita Stunting

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kota Surakarta pada tahun 2020 adalah 14 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 4 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Serengan (5 jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan Laweyan (0 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Banjarsari (2 jiwa) dan di Kecamatan Serengan, Jebres, serta Pesar Kliwon tidak ada kematian Ibu melahirkan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Serengan	5	0	5
2	Pasar Kliwon	2	0	2
3	Jebres	3	0	3
4	Banjarsari	4	2	6
5	Laweyan	0	2	2
	Total	14	4	18



Gambar IV.4 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

IV.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Masalah gizi kronis (*stunting*) masih tetap ada di Kota Surakarta masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya dirawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani), sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi *stunting* pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut bersifat multisektor.

 - a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabur (*sprinkle*) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.

- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian pil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi dibidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB V KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab I, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab II, III dan IV. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta VI.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

V.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kalurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kalurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kalurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kalurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

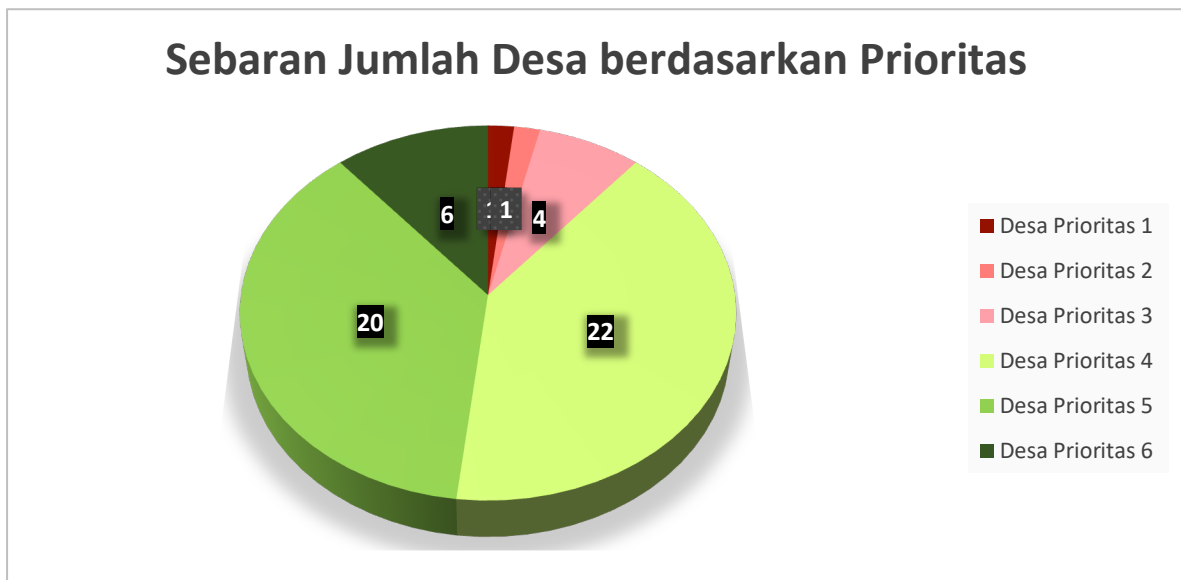
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 54 kalurahan yang ada di Kota Surakarta maka didapatkan 1 kalurahan (Prioritas 1), 1 kalurahan (Prioritas 2), 4 kalurahan (Prioritas 3), 22 kalurahan (Prioritas 4), 20 kalurahan (Prioritas 5) dan 6 kalurahan (Prioritas 6).

Tabel V.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

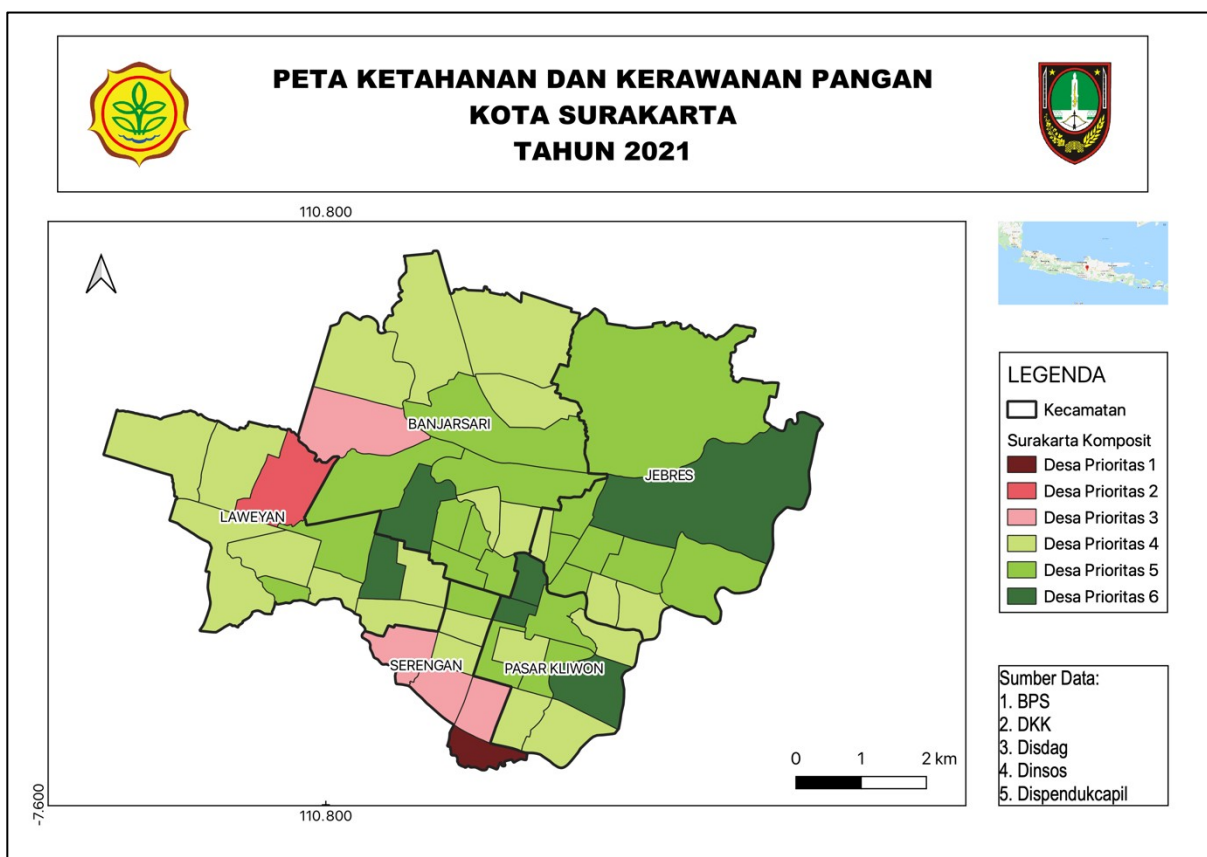
Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	1	2%
2	1	2%
3	4	7%
4	22	41%
5	20	37%
6	6	11%

Kalurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah Kecamatan Serengan di Kalurahan Joyontakan. Kalurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Laweyan di Kalurahan Kerten. Kalurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Banjarsari

di Kelurahan Sumber dan di Kecamatan Serengan yaitu di Kelurahan Danukusuman, Serengan dan Tipes.



Gambar V.1 Bagan Sebaran Jumlah Desa Prioritas 1



Gambar V.2 Peta Sebaran Jumlah Desa Prioritas 1

V.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1, 2, dan 3 secara umum disebabkan oleh: (1) jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, restoran, dll) rendah dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan (2) rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan rendah, dan (3) rasio jumlah penduduk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan tinggi.

BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (kalurahan), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kalurahan diprioritaskan pada:

- Kalurahan-Kalurahan prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Serengan, Laweyan dan Banjarsari

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kalurahan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar VI.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah Kota diarahkan pada kegiatan:

- Peningkatan diversifikasi sumber pangan
- Pemanfaatan Pekarangan untuk urban farming

- c. Penanganan kemiskinan melalui padat karya, pembangunan infrastruktur dasar dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/e-warong untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses IPAL masyarakat melalui penyediaan fasilitas dan layanan IPAL; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk di wilayah.

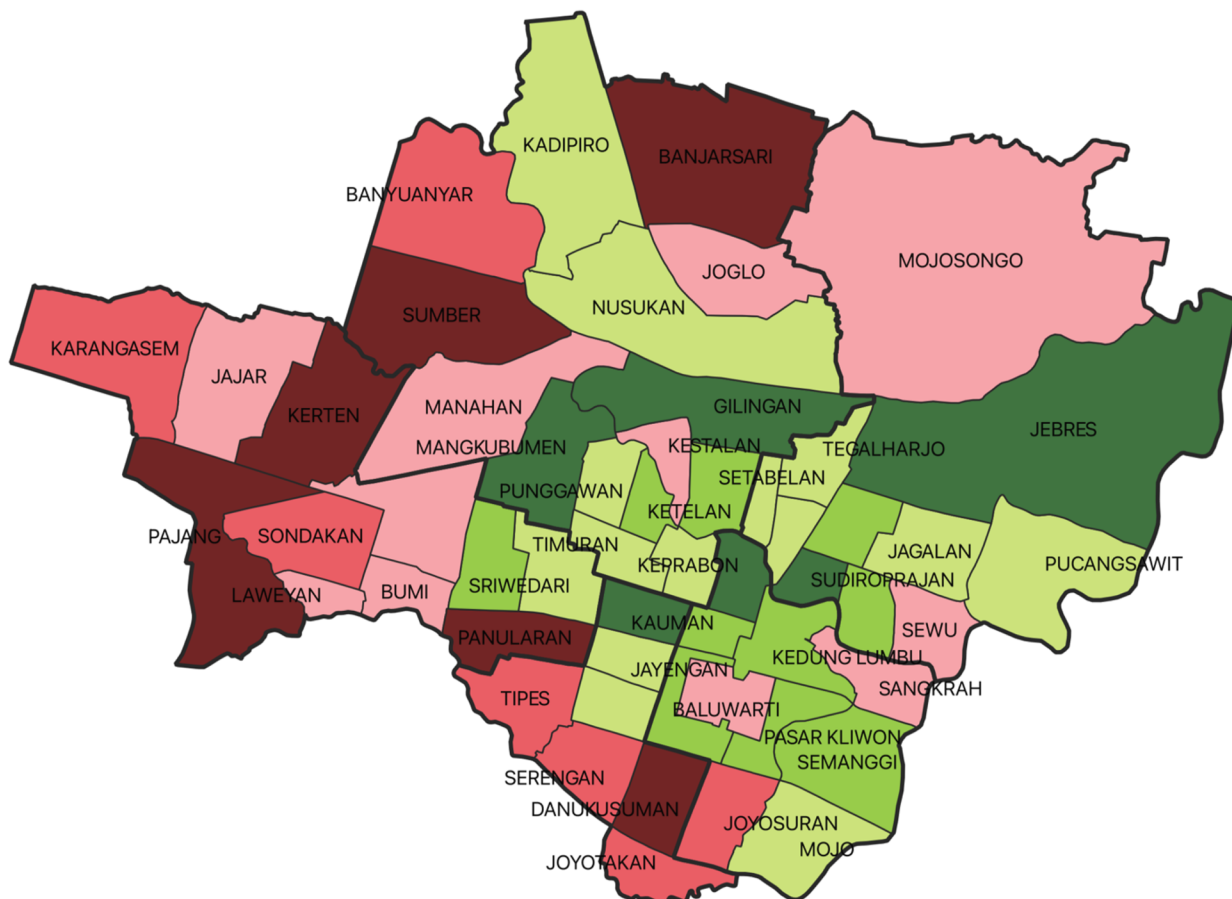
No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	LAWEYAN	3372011	3372011001	Pajang	1	5	4	1	6	63,10	41	4
2	LAWEYAN	3372011	3372011002	Laweyan	3	5	4	1	4	70,06	22	5
3	LAWEYAN	3372011	3372011003	Bumi	3	3	4	1	6	65,31	34	4
4	LAWEYAN	3372011	3372011004	Penularan	1	3	4	1	6	60,89	46	4
5	LAWEYAN	3372011	3372011005	Sriwedari	4	4	4	1	4	68,83	27	4
6	LAWEYAN	3372011	3372011006	Penumping	5	5	4	1	3	80,08	3	6
7	LAWEYAN	3372011	3372011007	Purwosari	3	5	4	1	4	69,47	25	5
8	LAWEYAN	3372011	3372011008	Sondakan	2	3	4	1	5	61,48	45	4
9	LAWEYAN	3372011	3372011009	Kerten	1	4	4	1	3	43,83	53	2
10	LAWEYAN	3372011	3372011010	Jajar	3	4	4	1	4	66,94	31	4
11	LAWEYAN	3372011	3372011011	Karangasem	2	6	4	1	3	65,12	35	4
12	SERENGAN	3372021	3372021001	Joyotakan	2	1	4	1	1	33,75	54	1
13	SERENGAN	3372021	3372021002	Danukusuman	1	2	4	1	1	49,63	52	3
14	SERENGAN	3372021	3372021003	Serengan	2	3	4	1	1	55,65	50	3
15	SERENGAN	3372021	3372021004	Tipes	2	2	4	1	1	53,00	51	3
16	SERENGAN	3372021	3372021005	Kratonan	4	4	4	1	1	62,18	43	4
17	SERENGAN	3372021	3372021006	Jayengan	4	6	4	1	1	64,80	38	4
18	SERENGAN	3372021	3372021007	Kemlayan	6	4	4	1	1	69,43	26	5
19	PASAR KLIWON	3372031	3372031001	Joyosuran	2	6	4	1	4	64,77	39	4
20	PASAR KLIWON	3372031	3372031002	Semanggi	5	4	4	1	5	77,23	6	6
21	PASAR KLIWON	3372031	3372031003	Pasar Kliwon	5	3	4	1	3	74,79	10	5
22	PASAR KLIWON	3372031	3372031005	Baluwarti	3	3	4	1	3	62,09	44	4
23	PASAR KLIWON	3372031	3372031004	Gajahan	5	4	4	1	3	73,45	15	5
24	PASAR KLIWON	3372031	3372031009	Kauman	5	6	4	1	3	77,41	4	6
25	PASAR KLIWON	3372031	3372031006	Kampung Baru	6	2	4	1	2	77,27	5	6
26	PASAR KLIWON	3372031	3372031007	Kedung Lumbu	5	4	4	1	2	75,81	9	5
27	PASAR KLIWON	3372031	3372031008	Sangkrah	3	3	4	1	5	64,29	40	4
28	PASAR KLIWON	3372031	33720310010	Mojo	4	2	4	1	4	68,65	28	4
29	JEBRES	3372041	3372041002	Kepatihan Wetan	4	3	4	1	5	70,46	20	5
30	JEBRES	3372041	3372041001	Kepatihan Kulon	4	1	4	1	5	66,63	32	4
31	JEBRES	3372041	3372041003	Sudiroprajan	6	1	4	1	6	74,26	11	5
32	JEBRES	3372041	3372041004	Gandekan	5	1	4	1	6	68,27	29	4
33	JEBRES	3372041	3372041005	Sewu	3	1	4	1	6	64,88	36	4

34	JEBRES	3372041	3372041006	Pucang Sawit	4	4	4	1	5	76,14	7	5
35	JEBRES	3372041	3372041007	Jagalan	4	4	4	1	6	72,86	16	5
36	JEBRES	3372041	3372041008	Purwadiningratan	5	2	4	1	5	73,56	13	5
37	JEBRES	3372041	3372041009	Tegalharjo	4	4	4	1	5	72,63	18	5
38	JEBRES	3372041	33720410010	Jebres	6	5	4	1	4	91,40	2	6
39	JEBRES	3372041	33720410011	Mojosongo	3	6	4	1	4	69,74	23	5
40	BANJARSARI	3372051	33720510010	Mangkubumen	6	5	4	1	2	92,41	1	6
41	BANJARSARI	3372041	3372041007	Timuran	4	4	4	1	6	72,86	16	5
42	BANJARSARI	3372041	3372041006	Keprabon	4	4	4	1	5	76,14	7	5
43	BANJARSARI	3372041	3372041008	Ketelan	5	2	4	1	5	73,56	13	5
44	BANJARSARI	3372041	3372041009	Punggawan	4	4	4	1	5	72,63	18	5
45	BANJARSARI	3372041	3372041005	Kestalan	3	1	4	1	6	64,88	36	4
46	BANJARSARI	3372041	3372041004	Setabelan	5	1	4	1	6	68,27	29	4
47	BANJARSARI	3372041	3372041003	Gilingan	6	1	4	1	6	74,26	11	5
48	BANJARSARI	3372041	33720410011	Manahan	3	6	4	1	4	69,74	23	5
49	BANJARSARI	3372041	33720410012	Sumber	1	4	4	1	3	58,33	49	3
50	BANJARSARI	3372041	3372041002	Nusukan	4	3	4	1	5	70,46	20	5
51	BANJARSARI	3372041	3372041001	Kadipiro	4	1	4	1	5	66,63	32	4
52	BANJARSARI	3372041	33720410013	Banyuanyar	2	6	4	1	2	62,44	42	4
53	BANJARSARI	3372041	33720410015	Joglo	3	1	4	1	4	59,62	48	4
54	BANJARSARI	3372041	33720410014	Banjarsari	1	5	4	1	2	60,40	47	4

Lampiran



PETA SEBARAN DESA RASIO SARANA PRASARANA EKONOMI
BERDASARKAN SKALA PRIORITAS
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021



Rasio Sarana
Prasaran Ekonomi

- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

Sumber Data:

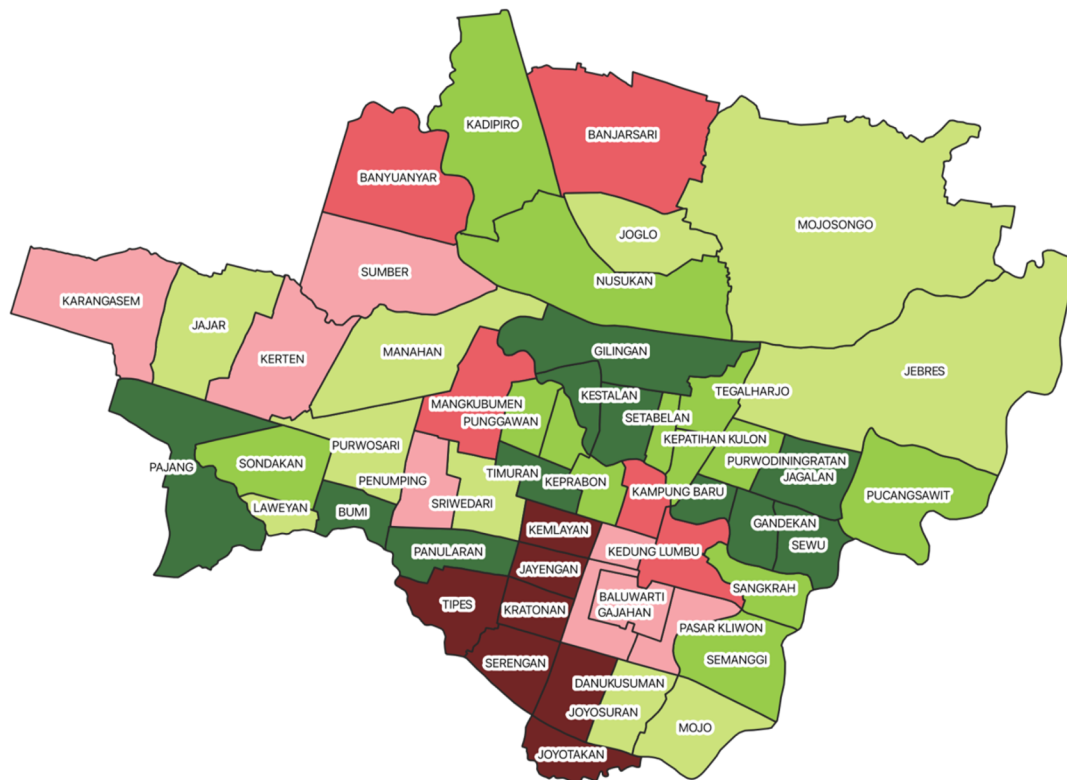
- 1.BPS
- 2.Dinas Perdagangan
- 3.Dispendukcapil

Disusun Oleh:

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta



PETA SEBARAN DESA TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH BERDASARKAN SKALA PRIORITAS KOTA SURAKARTA TAHUN 2021



Tingkat Kesejahteraan Terendah

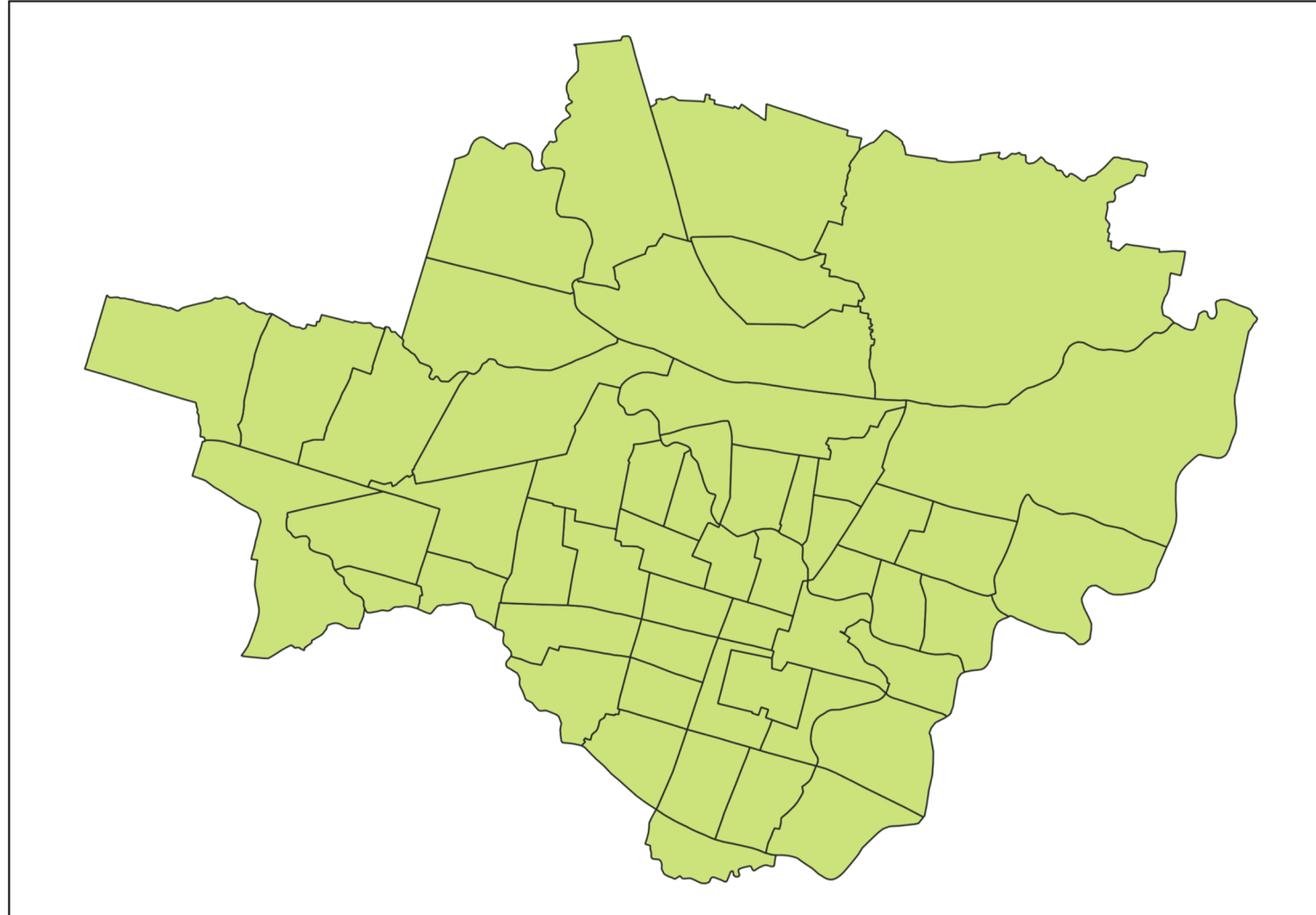
- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

Sumber Data:
1. BPS
2. Dinas Sosial
3. Dispendukcapil

Disusun Oleh:
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta



PETA SEBARAN DESA AKSES JALAN
BERDASARKAN SKALA PRIORITAS
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2021



Akses Jalan

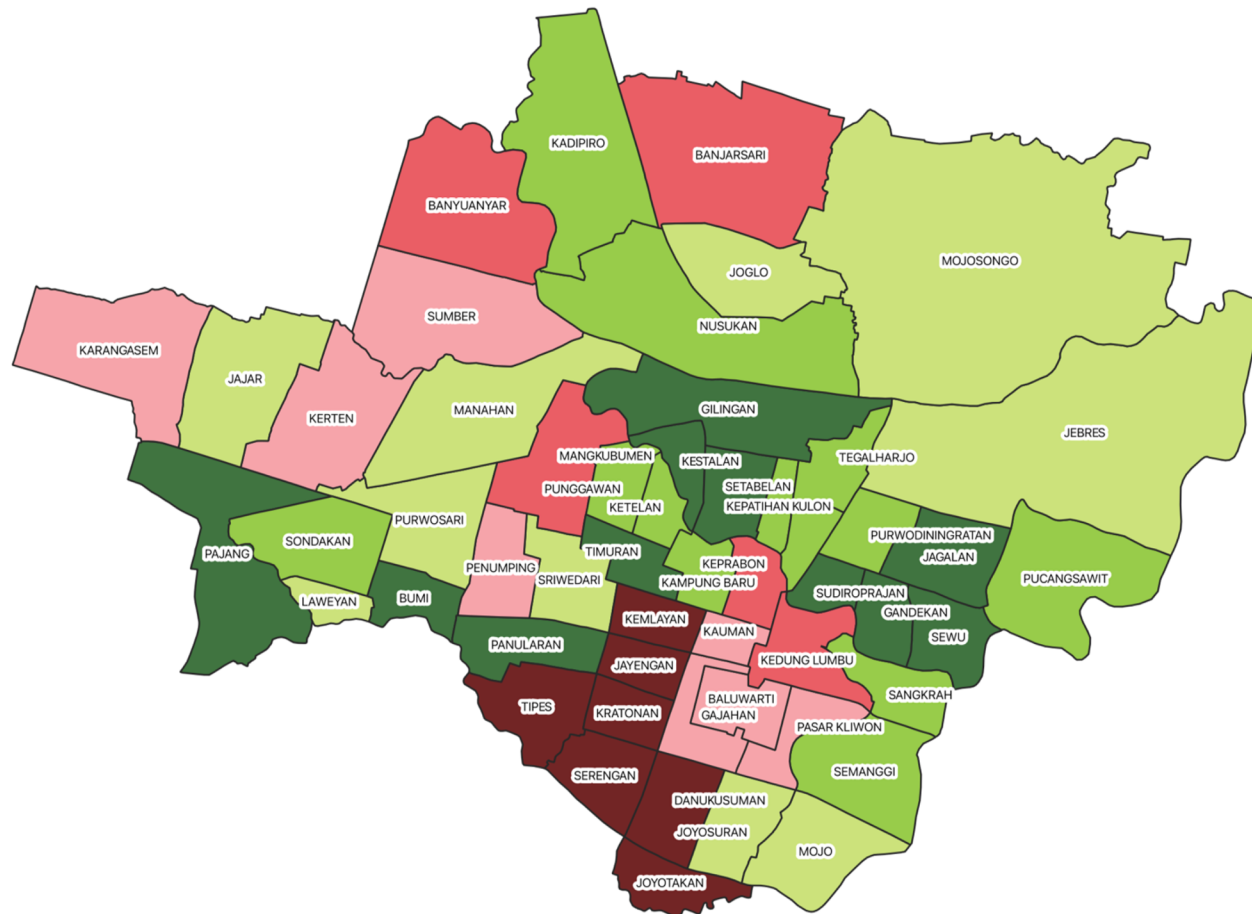
-  Desa Prioritas 1
-  Desa Prioritas 2
-  Desa Prioritas 3
-  Desa Prioritas 4
-  Desa Prioritas 5
-  Desa Prioritas 6

Sumber Data:
1. BPS

Disusun Oleh:
Dinas Pertanian Ketahanan
Pangan dan Perikanan
Kota Surakarta



PETA SEBARAN RASIO TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS KOTA SURAKARTA TAHUN 2021



Rasio Tenaga Kesehatan

- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

Sumber Data:

- 1.DKK
- 2.Dispendukcapil

Disusun oleh:

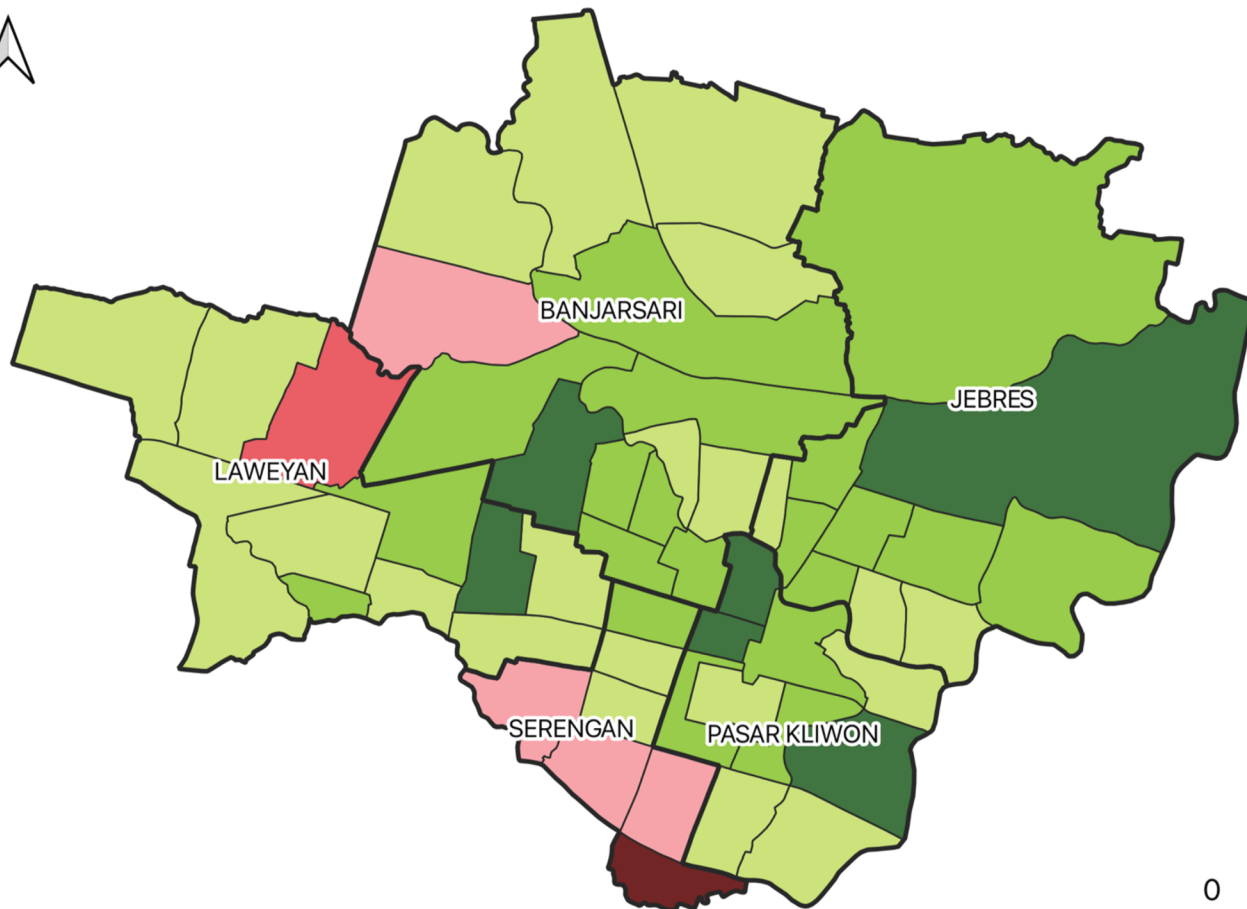
Dinas Pertanian,
Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kota Surakarta



PETA KETAHANAN DAN KERAWANAN PANGAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2021



110.800



LEGENDA

- Kecamatan
- Surakarta Komposit
 - Desa Prioritas 1
 - Desa Prioritas 2
 - Desa Prioritas 3
 - Desa Prioritas 4
 - Desa Prioritas 5
 - Desa Prioritas 6

Sumber Data:

1. BPS
2. DKK
3. Disdag
4. Dinsos
5. Dispendukcapil

0 1 2 km



-7.600

110.800